

KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG DAN DAMPAKNYA DI SURABAYA TAHUN 1950-1955**SUKAINAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: sukainahsukainah@mhs.unesa.ac.id

Nasution

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan sedikit banyak masih dibawah kendali asing. Untuk itu pemerintah ingin mewujudkan perekonomian dengan meningkatkan peran serta rakyat Indonesia atau disebut ekonomi nasional. Untuk mewujudkan ekonomi nasional tersebut, salah satu upaya pemerintah dengan menerapkan kebijakan ekonomi Benteng di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Surabaya. Surabaya sebagai kota dagang dan pelabuhan serta kota terbesar kedua Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut tentunya akan mempengaruhi kehidupan ekonomi di Surabaya. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan ekonomi Benteng (2) Bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya (3) Bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi Benteng terhadap pengusaha pribumi dan non-pribumi di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai pengaruh kebijakan ekonomi Benteng terhadap ekonomi dan perkembangan para pengusaha di Surabaya. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan ekonomi Benteng. Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka menciptakan pengusaha pribumi Indonesia dengan pemberian lisensi impor dan kredit. Para pengusaha di Indonesia tidak berkembang, kedudukannya kurang mampu dalam menyusun kekuatan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pengusaha Indonesia umumnya berpendidikan rendah sehingga kemajuan dalam mengembangkan usahanya kurang maksimal. Mereka tidak mampu menghadapi kekuatan pengusaha-pengusaha Barat yang modalnya besar dan modern. Karena hal itu pengusaha di Indonesia sangat bergantung pada pemerintah. Kebijakan ekonomi Benteng difokuskan pada sektor perdagangan impor karena lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah dan paling cocok untuk memajukan pengusaha pribumi karena membutuhkan modal yang sedikit. Pelaksanaan ekonomi Benteng di Surabaya tidak jauh berbeda dengan nasional. Kebutuhan untuk impor Benteng di Surabaya hanya bisa dilayani di KPUI Jakarta karena pada awal penerapannya jumlah importir Benteng masih sedikit dan agar para importir Benteng bisa lebih mandiri.

Pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Para pengusaha pribumi tidak mempunyai banyak pengalaman dan skill serta tidak mampu memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akibatnya banyak bermunculan pengusaha aktentas dan muncul sistem Ali-Baba. Kebijakan ini juga menimbulkan diskriminasi terhadap para pengusaha non-pribumi khususnya Tionghoa, mereka kesulitan mengimpor barang karena lisensi impor hanya diberikan kepada pengusaha pribumi. Meski dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan, namun berhasil membentuk pengusaha pribumi yang kuat walupun jumlahnya sedikit

Kata kunci: kebijakan ekonomi Benteng, Surabaya, ekonomi

Abstract

Indonesia's economy in the early independence remains more or less under the control of foreigners. Therefore, the government wants to realize the economy by increasing the participation of the people of Indonesia or referred to the national economy. To realize the national economy, one of the government's efforts to implement Benteng policies in Indonesia, one in the city of Surabaya. Surabaya role as a trading city and port and second largest city of Indonesia with the policy will certainly affect the economic life in Surabaya. The formulation of the problem taken in this study were (1) What is the background for the issuance of Benteng policy (2) How does the process of implementation of Benteng policy in Surabaya (3) What is the impact of Benteng policies against indigenou entrepreneurs and non-

natives in Surabaya. The purpose of this study to develop a depth of knowledge about the effects of economic policies on the economy and development Benteng entrepreneurs in Surabaya. The method used by the authors in this study is the historical method, which consists of heuristics, criticism, interpretation and historiography.

After the recognition of the sovereignty, the government implemented a policy of so-called Benteng policy. The purpose of this policy is to create indigenous Indonesian entrepreneurs with the licensing of imports and credit. The entrepreneurs in Indonesia is not growing, its position is less able to regroup in order to influence the course of the economy. Indonesian employers generally makes less educated so that progress in developing a business less than the maximum. They are not able to confront the power of Western businessmen whose capital is large and modern. Because it is entrepreneurs in Indonesia is very dependent on the government. Benteng policy is focused on the import trade sector because it is more easily controlled by the government and are best suited to promote indigenous entrepreneurs because it requires very little capital. Benteng policy performance in Surabaya is not much different from the national. The need to Benteng import in Surabaya only be served in KPUI Jakarta since early in its application the number of Benteng importers is still small and that the Benteng importer can be more independent.

Implementation of Benteng policies in Surabaya is not as expected by the government. The indigenous entrepreneurs do not have a lot of experience and skill, and not able to make good use of the facilities provided by the government as a result many emerging entrepreneurs briefcase and emerging system of Ali-Baba. This policy also discriminates against employers of non-native, especially the Chinese, they are difficult to import goods for import licenses are only given to indigenous entrepreneurs. Although there were many irregularities in the implementation, but managed to form a strong indigenous entrepreneurs even though slightly.

Keywords: *Benteng policy, Surabaya, Economy*

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia masih banyak yang dibawah kendali asing, terutama Belanda. Setelah perang kemerdekaan, terjadi peralihan dalam perekonomian Indonesia yaitu dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah pada saat itu berusaha mengubah perekonomian agar dibawah kekuasaan bangsa Indonesia.¹

Indonesia mengalami situasi yang buruk setelah perang kemerdekaan. Kehidupan rakyat dalam keadaan sulit, sementara kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan semakin meningkat.² Hal ini diperparah dengan peningkatan pertumbuhan penduduk sehingga menambah angka pengangguran baik di kota maupun di desa, selain itu akibat pertumbuhan penduduk juga mendorong terjadinya urbanisasi.

Menurut Sumitro pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya itu pada sektor perdagangan. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam proram Kabinet Natsir, saat menjabat sebagai menteri perdagangan. Gagasan tersebut dikenal dengan kebijakan ekonomi Benteng.

Melalui kebijakan ekonomi Benteng ini diharapkan dapat menumbuhkan golongan pengusaha pribumi yang

kuat sehingga dapat bersaing dengan pengusaha asing. Dengan kebijakan ini pemerintah memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengusaha pribumi diantara dengan memberikan lisensi impor untuk komoditas-komoditas tertentu hanya kepada warga negara Indonesia,³ membatasi impor barang-barang tertentu, memberikan bantuan kredit, dan membentuk badan yang mengorganisir dan memudahkan para importir pribumi dalam pembelian barang-barang impor.

Kota Surabaya merupakan pusat ekonomi. Kota Surabaya memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia terutama pada masa kolonial, yaitu sebagai penghasil komoditas ekspor, selain itu kota Surabaya juga sebagai daerah industri dan perdagangan.⁴ Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan mempengaruhi Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi.

Berdasar hal tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan ekonomi Benteng (2) Bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya (3) Bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi Benteng terhadap pengusaha pribumi dan non-pribumi di Surabaya?

METODE

Penelitian mengenai Kebijakan Ekonomi Benteng dan Dampaknya di Surabaya Tahun 1950-1955 menggunakan metode sejarah, yang mempunyai empat

¹ Denik Nurcahyanti. 2014. "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Surabaya Tahun 1950-1966". AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2 (3), hlm. 147

² Sumitro Djojohadikusumo. 2007. *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 16

³ Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia, hlm. 299

⁴ Nasution. 2006. *Ekonomi Surabaya pada masa kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Intelektual, hlm. 125

tahapan proses penelitian yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dengan keadaan ekonomi pada masa kebijakan ekonomi Benteng di Indonesia pada umumnya dan di Surabaya pada khususnya. Sumber yang digunakan dalam mengkaji bahasan tersebut adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang didapatkan penulis berupa, arsip, surat kabar, dan majalah sejaman.

Penulis mendapatkan sumber primer berupa Arsip di Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BAPERSIP) Kota Surabaya. Untuk sumber primer berupa surat kabar dan majalah, penulis banyak mendapatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Stikosa AWS. Surat kabar yang didapatkan penulis diantaranya Surat Kabar *Berita Ekonomi*, *Malang Post*, *Pewart Soerabaia*, *Sin Po*, *Suara rakjat*, *Surabaya Post*, majalah *Dunia Ekonomi*, *Star Weekly*, dan *Warta Ekonomi*. Penulis mengumpulkan sumber sekunder dengan mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan yang penulis kunjungi antara lain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi (BAPERSIP) Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung, Perpustakaan STIKOSA-AWS, Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya dan *Jogya Library Center*.

Setelah sumber-sumber yang terkait diperoleh, selanjutnya dilakukan penelaahan serta pengklasifikasian terhadap sumber-sumber sehingga diperoleh sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji.

Langkah kedua adalah kritik. Pada tahap ini dilakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh guna untuk mengetahui kebenaran dan ketepatan sumber sejarah. Hal ini dilakukan agar tulisan sejarah yang dihasilkan bersifat objektif. Kritik sumber terdiri atas kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern untuk menguji otentitas atau keaslian dari semua sumber yang telah didapatkan Adapun kritik intern dilakukan penulis untuk menguji bahwa sumber-sumber yang telah terkumpul dapat dipercaya. Dalam tahap ini penulis membandingkan buku satu dengan buku yang lain untuk mempertimbangkan informasi yang didapat di dalam buku-buku tersebut sehingga diperoleh sumber yang layak dan dapat dipercaya kebenarannya. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada kritik intern.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini penulis mencari saling hubungan antara berbagai fakta yang telah ditemukan kemudian menafsirkannya. Selanjutnya fakta-fakta tersebut dibagi dalam beberapa kelompok

yang saling berhubungan. Kemudian dari setiap kelompok dilakukan penafsiran sehingga diperoleh suatu kerangka berfikir yang merupakan hasil interpretasi dari penulis sendiri.

Tahap terakhir dari penelitian adalah historiografi. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis. Penulis menyusun hasil penelitian secara kronologis dan analitis berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG

a) Kondisi Perekonomian Indonesia

Pada awal kemerdekaan kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang buruk baik secara makro maupun mikro. Perekonomian sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, kopi, tembakau, teh dan gula. Merosotnya produksi pertanian dalam berbagai komoditi yang berakibat pada menurunnya ekspor dan cadangan devisa berkurang. Selain itu juga terjadi inflasi yang tinggi akibat beredarnya tiga mata uang yang digunakan di Indonesia. Tiga mata uang tersebut adalah mata uang NICA, Jepang dan uang kertas *De Javasche Bank* (DJB).

Selama periode 1950-an perekonomian Indonesia masih sangat buruk, akibat pengaruh dari pendudukan Jepang maupun Belanda. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing yang kebanyakan berorientasi pada ekspor. Perkebunan-perkebunan dan industri mengalami kerusakan, ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat.⁵

Kondisi ekonomi Indonesia segala aspeknya dikuasai pihak asing dan mendapat perlindungan oleh pemerintah Belanda. Struktur ekonomi kolonial merupakan warisan kolonialisme Belanda di Indonesia untuk itu pemerintah Indonesia mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Meskipun pemerintah Belanda dianggap sebagai pengurus kolonial yang paling maju, namun rakyat Indonesia hidup sengsara.

b) Latar Belakang Kebijakan Ekonomi Benteng

Sistem perekonomian Indonesia sebelum perang didasarkan pada produksi ekspor barang-barang pertanian. Untuk membiayai keperluan impor dari luar negeri dan untuk pembayaran-pembayaran sangat bergantung pada hasil-hasil impor. Namun

⁵ Ricklefs, M.C dan Moh. Sidik Lughra. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm. 358

setelah pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, terjadi kerusakan pada faktor-faktor produksi ekspor. Hal tersebut menghambat kegiatan ekonomi Indonesia. Setelah perang kemampuan produksi hanya mencapai 30%.⁶

Akibat kebutuhan dalam negeri yang tidak mencukupi menjadikan barang-barang di lapangan melonjak naik. Tidaknya hanya barang-barang impor saja yang naik, barang-barang dalam negeripun ikut naik. Para importir diberi ijin untuk memperbaharui harga sehingga harga barang menjadi mahal dari pada sebelumnya.

Politik pintu terbuka yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda menyebabkan adanya penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini membuat sampai tahun 1950-an banyak modal asing di Indonesia. Memang penanaman modal asing sangat diperlukan, tetapi juga perlu memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Ekonomi Indonesia tahun 1950-an menganut sistem liberal, dimana penanaman modal bebas menjadikan produksi bertambah, tetapi tingkat hidup rakyat Indonesia tidak banyak mengalami perubahan.

Kelas pengusaha di Indonesia tidak berkembang. Kedudukan pengusaha di Indonesia kurang mampu dalam menyusun kekuatan guna untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pengusaha di Indonesia kebanyakan merupakan kelanjutan pengusaha sebelum perang, seperti pengusaha batik, rokok kretek, karet kopra, bisa dikatakan kebanyakan pengusaha-pengusaha kecil. Pengusaha Indonesia umumnya pendidikannya rendah sehingga kemajuan dalam mengembangkan usahanya kurang maksimal. Mereka tidak mampu menghadapi kekuatan pengusaha-pengusaha Barat yang modalnya besar dan modern. Karena hal itu pengusaha di Indonesia sangat bergantung pada pemerintah.

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG DI SURABAYA

a) Gambaran Umum Kota Besar Surabaya

Doel Arnowo merupakan walikota pertama Kota Besar Surabaya setelah kemerdekaan. Pada masa walikota Doel Arnowo nama pemerintah kota yang semula pada masa kolonial bernama *Gemeente* (kemudian ditingkatkan menjadi *stadsgemeente*) dan pada masa pendudukan Jepang bernama *Shi*, diubah namanya menjadi pemerintah Kota Besar Surabaya. Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1948 yang menyebutkan bahwa

pemerintah kota dibedakan menjadi dua yaitu pemerintah kota besar dan pemerintah kota kecil. Penetapan Kota Surabaya menjadi Kota Besar adalah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus.⁷

Adapun luas Kota Besar Surabaya pada masa ini adalah 92 km² dan secara dibagi menjadi enam kecamatan, yaitu Krembangan, Kranggan, Kupang, Ketabang, Kapasan, dan Nyamplungan. Bagian pemerintahan terkecil pada masa kolonial dinamakan dengan *wijk* diubah menjadi nama *lingkungan* yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan. Pada masa kolonial jumlah *wijk* sebanyak 26 *wijk* bertambah menjadi 37 Lingkungan.⁸

Pada 1950-an jumlah penduduk kota Besar Surabaya meningkat dalam kurun waktu yang singkat dari kurang lebih 400.000 jiwa pada masa pendudukan Jepang menjadi 1.000.000 jiwa pada awal tahun 1950-an⁹. Hal ini membuat Kota Surabaya padat penduduk. Berikut rincian pertumbuhan penduduk Kota Besar Surabaya yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	1940	197.999	198.730	396.729
2	1950	303.558	361.340	714.898
3	1960	655.650	663.280	1.318.930

Sumber: diolah dari Aminuddin Kasdi, dkk. 2008. *Surabaya dan Jejak Kepahlawanannya*. Surabaya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, hlm. 23

Faktor pengembangan Kota Surabaya salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk ini. Fungsi kota sebagai jantung ekonomi adalah sebab dari meningkatnya penduduk di Kota Surabaya. Kota sebagai jantung ekonomi membuat banyak penduduk yang bermigrasi ke Kota Surabaya untuk mengadu nasib

b) Kehidupan Ekonomi Masyarakat Surabaya 1950-an

Pusat ekonomi Surabaya saat itu berada di kawasan segiempat emas ekonomi yaitu Kalimas, Tunjungan, Kembang Jepung, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Kalimas merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan sejak masa lalu. Keberadaan Kalimas sebagai penunjang perkembangan Kota Surabaya. Pada masa kolonial Kalimas merupakan urat nadi arus lalu lintas pelayaran yang memegang

⁷Purnawan Basundoro. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman, Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 52

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 120

⁶ Sumitro Djojohadikusumo. 1953. *Persolan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33

peranan strategis sehingga banyak kegiatan pemerintahan dan bisnis banyak yang berada disekitar Kalimas, khususnya disekitar Jembatan Merah banyak gedung-gedung tua peninggalan Belanda yang ada sampai sekarang. di sepanjang bantaran Sungai Kalimas terdapat beberapa pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat Surabaya pada masa itu, yaitu Pasar Pabean, Pasar Atom, Pasar Genteng, Pasar Pasar Kayun, dan Pasar Blauran.¹⁰

Pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 Surabaya menjadi kota dagang dan industri terbesar. Tunjungan yang pada awalnya berkembang menjadi jalan protokol mula banyak bermunculan toko-toko. Lagu *Rek ayo rek, mlaku-mlaku nang Tunjungan* merupakan sebuah bukti bahwa Tunjungan sejak lama merupakan pusat kota dan menjadi salah satu pusat ekonomi di Surabaya.

Kawasan Kembang Jepun yang dulu bernama *handelstraat* merupakan salah satu urat nadi perekonomian Surabaya karena lokasinya yang strategis berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan di topan oleh keberadaan Jembatan Merah disisi Barat serta stasiun semut disisi Timur.

Setelah tahun 1910, pembangunan fisik Pelabuhan Tanjung Perak dimulai. Setelah selesainya pembangunan kapal-kapal samudera dapat melakukan aktivitas bongkat di pelabuhan. Pelabuhan Kalimas kemudian berfungsi untuk melayani angkutan tradisional dan kapal-kapal layer sedangkan pelabuhan yang terletak di Jembatan Merah secara perlahan mulai ditinggalkan. Sejak saat itulah, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur tetapi juga bagi seluruh kawasan Timur Indonesia.¹¹

Kota Surabaya telah menjadi pusat perniagaan antar pulau yang memiliki dampak sampai saat ini. Letaknya yang strategis menjadikan Kota Surabaya disinggahi oleh para pedagang dan banyak pedagang yang kemudian menetap di Surabaya. Selain itu sebagian besar masyarakat Kota Surabaya mengandalkan hidupnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri.

Peningkatan ekonomi dalam sektor perdagangan menjadikan pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Pasar Atom Baru. Selain

pengembangan dan pembukaan pasar-pasar baru di Surabaya, perekonomian juga disokong oleh pembukaan bank-bank swasta, seperti I.M.A Bank dagang. Bank ini membantu para pedagang yang membutuhkan modal khususnya bakul-bakul kecil dalam pasar di seluruh Kota Surabaya.¹² Dengan adanya bank-bank tersebut dapat menyokong para pedagang-pedagang kecil dan ikut menumbuhkan perekonomian Kota Surabaya.

Kota Surabaya merupakan kota tujuan untuk mencari lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berasal dari daerah atau desa disekitarnya. Pada kenyataannya kaum pendatang ini lebih banyak yang menjadi pengangguran karena minimnya bekal pengalaman dan keahlian. Akibatnya hal ini justru menimbulkan permasalahan bagi kota Kota Surabaya yaitu meningkatnya angka pengangguran.

c) Kebijakan Ekonomi Benteng di Surabaya

Pemerintah menjadikan sektor perdagangan terutama perdagangan import agar dapat menumbuhkan pengusaha pribumi dan menciptakan kekuatan ekonomi nasional. Indonesia masih membutuhkan barang dan bahan yang harus didatangkan dari luar negeri (impor), oleh sebab itu adanya para importir pribumi ini sangat diharapkan dan mempunyai arti yang penting. Pemerintah mengusahakan agar para importir pribumi ini mendapatkan kedudukan yang terpenting. Para importir pribumi ini harus dapat menjamin kelancaran pengiriman kebutuhan dari luar negeri untuk kebutuhan rakyat di dalam negeri.

Pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak lepas dari pelaksanaan ditiap-tiap daerah, salah satunya Surabaya. Kota Surabaya juga memiliki andil dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng.

Sejak tahun 1950 badan atau kantor yang ditugaskan untuk menyelenggarakan bagian impor adalah KPUI (Kantor Pusat Urusan Impor) yang bertugas dibawah pimpinan Jawatan Perdagangan dan Kementerian Perekonomian termasuk juga yang mengatur impor Benteng.

Kantor Urusan Impor Cabang Surabaya dibentuk pada 1 juni 1951 yang dikepalai oleh Pattiradjawane. Untuk kepentingan impor Benteng belum dibisa dilayani di Kantor Urusan Impor Cabang Surabaya melainkan harus di KPUI di Jakarta. Hal ini karena kegiatan import Benteng di Surabaya dianggap sepi, sehingga para importir Benteng harus datang ke Jakarta untuk urusan pelaksanaan impor barang-

¹⁰ <http://projectmedias.blogspot.co.id/2014/03/menengok-keberadaan-pasar-tradisional.html> (diakses pada 14 juni 2016)

¹¹ Yulita Wisuda Ningrum. 2012. *PA : Sistem Administrasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya. Undergraduate thesis, STIKOM Surabaya.* (<http://sir.stikom.edu/1028/>) Diakses 13 Agustus 2016, hlm. 7

¹² *Pewarta Soerabaia*, 13 Desember 1950

barang Benteng.¹³ Jadi untuk pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan secara nasional karena kepentingan ekonomi Benteng di Surabaya diselenggarakan oleh Kantor Pusat Urusan Import di Jakarta. Baru pada tahun 1953 mulai ada kantor-kantor yang didirikan oleh para importer Benteng untuk mengurus perijinan devisa.

Pada 2 juni 1951 diadakan pertemuan dengan Kantor Urusan Impor Cabang Surabaya dan para importir yang ada di Surabaya baik importir Tionghoa, Indonesia, Belanda dan bangsa yang lain.¹⁴ Dalam pertemuan tersebut didiskusikan sekitar permasalahan impor, juga mengenai impor Benteng. Untuk masalah kartu pengenalan tidak bisa dilayani di Kantor Urusan Impor Cabang Surabaya melainkan harus ke KPUI di Jakarta. Selain itu juga para importir Benteng juga diharuskan memiliki *inkoopkantor* atau badan atau kantor penghubung di luar negeri. Hal ini memberatkan para importir Benteng dikarenakan kedudukannya yang masih pemula dan belum cukup kuat.

Dalam pelaksanaannya kebijakakan ekonomi Benteng berlasung dalam beberapa kabinet yang berkuasa. Pada 6 September 1950 dibentuk kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951) berdasarkan keputusan Presiden No. 9 tanggal 6 September 1950. Program kerja kabinet Natsir yaitu mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.¹⁵

Adanya pemberian modal berupa kredit bagi para pengusaha pribumi, banyak penduduk pribumi yang mulai mendirikan usahanya. Pada tahun 1952 banyak perusahaan-perusahaan swasta di Kota Surabaya mulai mendapatkan lisensi¹⁶. Namun sebagian besar yang mendaftarkan perusahaannya berasal dari etnis Tionghoa. Hanya sedikit dari penduduk pribumi yang mendaftarkan perusahaannya.

Setelah jatuhnya kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman (April 1951 – April 1952). Sebagai pengganti kabinet Natsir, pada masa kabinet Sukiman juga diterapkan kebijakan ekonomi Benteng. Pada masa ini pemerintah lebih cenderung memperbaiki dan melakukan perubahan pada program kerja kabinet sebelumnya yang dirasa kurang efektif.

Mulai 1 April 1951 berlaku peraturan prosedur import yang baru. Kantor Pusat Urusan Impor diberi kuasa untuk pembayaran barang-barang impor dan menandatangani ijin devisa. Selain itu bank-bank pun juga diberi kuasa untuk membayar ijin devisa seri 8 yang ditandatangani oleh Kantor Pusat Urusan Impor.¹⁷ Dengan adanya prosedur ini para importir Benteng tidak hanya dapat mengambil kredit pada bank-bank negara tetapi juga bisa pada bank-bank lainnya di Surabaya.

Pada April 1951 diadakan perubahan pula pada cara pelaksanaan impor barang-barang Benteng. Pembagian barang-barang yang khusus untuk importir Benteng dirubah. Para importir Indonesia lainnya juga bisa mengimpor barang-barang ini sehingga terjadi persaingan antara para importir ini. Perubahan prosedur impor barang-barang Benteng tidak berarti para importir Benteng di Surabaya mendapat ijin seluas-luasnya untuk penggunaan devisa impor barang Benteng. Kantor Pusat Urusan Impor mengawasi dan membatasi pemberian ijin devisa terhadap importir Benteng karena jumlah barang golongan Benteng yang terbatas.¹⁸ Di Surabaya ijin devisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Import Surabaya tahun 1952 berjumlah Rp. 357.810.808 dan tahun 1953 berjumlah Rp. 1.008.200.¹⁹

Middenstand Verëningin Surabaya memperbolehkan kaum pertengahan untuk mengimpor barang-barang golongan Benteng dengan ketentuan

1. Kaum pertengahan diperbolehkan mengimpor barang² benteng atas devisa kaum pertengahan (D.k.p) yang mana tidak termasuk dalam perlengkapan umum. Mereka dapat melakukan import sendiri, atau menjuruh melakukan melalui para importir yang mereka tundjuk.
2. Barang² benteng yang termasuk dalam perlengkapan umum hanya dapat diimport oleh para importir Benteng.
3. Ketentuan dalam sub 2 berlaku juga bagi kaum pertengahan yang melakukan import sendiri.²⁰

Pemerintah mengeluarkan surat indusemen baru atau bukti impor tambahan terutama digunakan untuk impor barang-barang mewah dan tidak termasuk barang-barang esensial. Pada masa ini juga

¹³ *Pewarta Soerabaia*, 2 Juni 1951

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suroso, dkk. 1997. *Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, cetakan ke-4*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 58

¹⁶ Pendaftaran Perusahaan Lingkungan Darmo. Arsip Kota Surabaya tahun 1952

¹⁷ *Pewarta Soerabaia*, 6 April 1951

¹⁸ Saroso Wirodiharjo. 1956. *Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Djakarta Press N.V. hlm 121-122

¹⁹ Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur hlm. 453

²⁰ *Pewarta Soerabaia*, 17 Mei 1951

pemerintah memberikan bantuan modal berupa kredit secara mudah kepada para importir.

Pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng juga di laksanakan pada masa kabinet Wilopo (April 1952 – Juli 1953). Pada masa ini peraturan lebih diperketat. Banyak aturan-aturan baru yang diterapkan dalam bidang impor dikarenakan menurunnya cadangan devisa Negara setelah berakhirnya Perang Korea.

Pada 11 Agustus 1952 pemerintah melakukan perubahan terkait barang-barang import. barang-barang impor dibagi kedalam empat golongan yaitu golongan A, B, C, dan D. Dikeluarkannya peraturan impor ini mendapatkan tanggapan dari D. Budiman dari Dewan Ekonomi Indonesia yang berpendapat bahwa peraturan ini merupakan pukulan bagi pengusaha Indonesia dan mengingat semua disentralisasi di Jakarta maka importir di Surabaya akan mendapat kerugian waktu dan biaya.

Peraturan pemerintah mengenai barang-barang import menyebabkan terjadinya monopoli beberapa macam barang impor. Para importir Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Indonesia Surabaya melakukan rapat pada 8 Agustus 1952, hasil rapatnya yaitu membenarkan tindakan pemerintah untuk mengorganisir impor Cambrics dan karena lapangan pekerjaan menjadi kurang, maka para importir Benteng akan mengajukan permintaan kepada pemerintah agar barang-barang Benteng ditambah dan dengan beberapa macam lagi.²¹

Karena berkurangnya cadangan devisa negara, melalui surat edaran No.28 bahwa mulai tanggal 29 Agustus 1952 diselenggarakan pemberian ijin devisa kepada Kantor Pusat Urusan impor. Importir yang akan memasukkan barang harus melakukan permintaan kepada K.P.U.I dan akan menerima ijin sementara yang dinamakan slip. Dengan slip ini importir dapat memperoleh ijin devisa dan harus menyetor terlebih dahulu dana devisa kepada bank sebesar 40% dari harga cific rupiah dari barang yang akan diimpor.

Berhubungan dengan kewajiban penyetoran 40%, para importir pribumi di Surabaya meminta kepada para pemerintah agar memperluas pemberian kredit. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi pemerintah. Pemerintah telah memberikan bantuan seluas-luasnya kepada para importir pribumi yang lemah dan para importir Benteng

Ada banyak perubahan sekitar prosedur impor selain masalah pemberian ijin devisa. Kementerian Perekonomian dan Keuangan mengeluarkan surat keputusan No. 817/M, tertanggal 22 Januari 1953

diadakan perubahan pembagian golongan barang-barang A-D dan barang golongan B dibagi menjadi dua yaitu B I dan B II. Golongan barang yang menentukan besarnya bukti indusemen disebut Tambahan Pembayaran Import

Pada masa kabinet ini juga pernah terjadi keterlambatan barang-barang import karena banyak baran-barang yang belum dimasukkan menurut golongan A–D. Di Tanjung perak sudah disusun sekitar 1200 macam barang. Dalam buku statistik tahun 1951 telah dimasukkan 9000 macam barang, sedangkan pada saat itu barang yang ada belum dimasukkan kedalam salah satu daftar.²² Hal ini tidak menimbulkan masalah yang serius namun banyak gudang yang kosong di pelabuhan

Mulai 1 april 1953 pemerintah memberlakukan aturan yang baru lagi bahwa para importir harus menyetor 75% dari harga importnya pada bank bukan lagi 40%. Hal ini menimbulkan reaksi dalam kalangan importir.²³ Para importir di Surabaya merasa kewalahan sedangkan mereka dalam situasi kesulitan dalam modal. Hal ini bukan dapat mempercepat import tetapi malah justru memperlambat import.

Jatuhnya kabinet Wilopo selanjutnya pemerintahan digantikan oleh Kabinet Ali I (Juli 1953 – Agustus 1955). Kabinet Ali dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 132 tanggal 30 Juli 1953. Kebijakan ekonomi Benteng tetap dilanjutkan oleh kabinet Ali .

Pemerintah membuka kesempatan bagi importir pribumi khususnya importir Benteng untuk menjadi importir nasional. Para importir kemudian diminta untuk mengirimkan pernyataan dan balasan sesuai syarat-syarat tersebut dan mengirimnya kepada Jawatan Perdagangan setempat.

Keadaan ekonomi diperburuk oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan pada saat itu, diantaranya Menteri Perekonomian Isqak Tjokrohadisoerjo mengubah struktur pembagian devisa. Menurutnya perlindungan kepada importir pribumi dirasa kurang dan seharusnya mereka diberi proteksi yang lebih besar. Pada 8 September 1953 pemerintah mengeluarkan surat edaran yan dikenal dengan surat edaran P.41. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pemberian lisensi devisa kepada para importir pribumi sebanyak 80 – 90%. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah juga mengklasifikasikan barang-barang yang hanya boleh di impor oleh importir pribumi.

²¹ *Pewart Soerabaia*, 16 Agustus 1952

²² *Pewart Soerabaia*, 21 februari 1953

²³ *Pewart Soerabaia*, 4 April 1953

Pada masa kabinet ini pemerintah mempermudah perkembangan pengusaha pribumi golongan lemah. Dengan dikeluarkannya surat turutan dari Kementerian Perindustrian tanggal 23 Juli 1953 Nomor 2111/BP 602.0-B kepada seluruh kepala provinsi dan karesidenan untuk mempermudah dan memberikan fasilitas seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia golongan lemah.²⁴ Sedangkan untuk warga negara keturunan asing pemerintah meminta kepada mereka agar bersama-sama pribumi mendirikan dalam bentuk *minddenstand* yang mana 50% sahamnya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia asli (pribumi). Selain itu juga pabrik-pabrik yang dimiliki oleh asing diharuskan membuka lapangan pekerjaannya kepada pribumi dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu.²⁵

Jatuhnya Kabinet Ali I kemudian digantikan oleh Kabinet Baharuddin Harahap (Agustus 1955 – 1956). Pada masa ini, kebijakan ekonomi Benteng juga terus dijalankan, bahkan pemerintah melakukan perubahan secara drastis pada sistem impor yang dianggap sangat berbeli-belit.

Kebijakan ekonomi Benteng tidak mendapat perhatian lagi dan secara resmi dihentikan pada 1957. Di Kota Surabaya pelaksanaan ekonomi Benteng sudah tidak tersorot lagi oleh media mulai 1955. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan ekonomi Benteng di Surabaya tidak diperhatikan lagi.

C. DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI BENTENG DI SURABAYA

a) Dampak Terhadap Pengusaha Pribumi Surabaya

Pada Tahun 1953 pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng ini memberikan pengaruh yang positif pada pengusaha pribumi di Surabaya. Para pengusaha pribumi dapat bersaing dengan para pengusaha asing. Dari seluruh impor di Surabaya tahun 1953 sebanyak 50% dan 10% ekspor berada ditangan pengusaha pribumi.²⁶ Kebijakan ini juga meningkatkan jumlah pengusaha pribumi di Surabaya karena berbagai kemudahan yang disediakan oleh pemerintah dalam memperoleh kredit, lisensi dan fasilitas lainnya dalam menunjang usaha para pengusaha pribumi.

Di Surabaya para pengusaha pribumi mulai mendirikan organisasi-organisasi untuk memperkuat lapangan ekonomi mereka. Seperti yang dilakukan

oleh para importir Jawa Timur. Untuk mewujudkan tumbuhnya para pengusaha pribumi yang kuat mereka membentuk suatu persatuan pada 19 Desember 1953 di Surabaya yaitu Persatuan Importir Indonesia dengan Sumarna dari N.V.²⁷ Sebelumnya pada 9 Maret 1951 pemerintah Kota Pradja Surabaya telah mengakui dengan resmi organisasi yang bernama Gabungan Pedagang Beras Import Pembagian (G.P.B.I & P).²⁸ Kalangan firma-firma nasional juga menggabungkan diri pada sebuah organisasi yang bernama Serikat Usaha Nasional Indonesia yang disingkat dengan Sruni.²⁹

Tumbuhnya pengusaha pribumi di Surabaya juga didukung oleh Pemerintah Kota Besar Surabaya. Diperluasnya usaha bagi pengusaha pribumi dengan dibangunnya 78 toko di sekeliling pasar Keputran. Para pedagang kecil disekitar jalan. Pemerintah Kota Surabaya juga membantu untuk kemajuan perkembangan industri bangsa Indonesia di Surabaya dengan menyediakan lahan di sekitar *boozemkanaal* (Dupak Baru) untuk pendirian *industry-industri* bangsa Indonesia.³⁰

Namun peraturan pemberian devisa hanya kepada importir pribumi justru mempersulit mereka. Untuk sebagian impor saja banyak pengusaha pribumi yang terkendala pada modal, dengan adanya peraturan tersebut semakin mempersulit mereka, ditambah dengan keadaan ekonomi yang buruk dan adanya tekanan inflasi menyebabkan banyak importir yang gulung tikar. Jumlah importir nasional di Jawa Timur menurun, sebelumnya tercatat ada 120 importir nasional menjadi 60 importir. Sedangkan importir asing sebelumnya ada 400 menjadi 200.³¹

Dengan adanya kebijakan ekonomi di Surabaya ini memang dapat meningkatkan jumlah pengusaha pribumi di Surabaya, namun kebanyakan dari mereka merupakan golongan *new comer* yang tidak mempunyai banyak pengalaman dan *skill* dalam bidang perdagangan seperti tidak tahu prosedur dalam impor. Sehingga banyak diantara mereka yang menyalahgunakan haknya sebagai importir Benteng dan menjadi “pengusaha aktentas”.³²

Adanya pengusaha aktentas justru malah memperkuat kedudukan pengusaha non-pribumi. Para pengusaha non-pribumi dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan mudah lewat pemegang lisensi boneka pribumi, yaitu para

²⁴ Surat Turunan dari Kementerian Perindustrian tanggal 23 Juli 1953 Nomor 2111/BP 602.0-B. Arsip Kota Surabaya tahun 1955

²⁵ Siaran Djawatan Perindustrian tentang soal warga negara keturunan Asing dalam Perindustrian. Arsip Kota Surabaya tahun 1955

²⁶ Malang Post, 19 Desember 1953

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Pewarta Soerabaia*, 10 Maret 1951

²⁹ *Suara Rakjat*, 23 Maret 1955

³⁰ *Pewarta Soerabaia*, 21 Juli 1953

³¹ *Pewarta Soerabaia*, 5 Agustus 1953

³² Saroso Wirodiharjo. *Masalah Perdagangan dan Politik ekonomi Indonesia*. Jakarta: Djakarta Press N.V. *Opcit*, hlm. 76

pengusaha aktentas.³³ Hal ini mengakibatkan para pengusaha pribumi tidak dapat berkembang, dan merugikan para pengusaha pribumi yang telah mapan karena mereka harus bersaing dengan para pengusaha non-pribumi yang telah kuat.

Selain itu para pengusaha pribumi yang kurang pengalaman dan *skill* tersebut tidak mementingkan barang yang laku di pasaran, kualitas barang, harga pasar dan organisasi, mereka hanya ingin mengambil keuntungan semata. Seperti yang diberitakan di surat kabar *Suara Rakjat* bahwa ada importir pribumi yang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga importir tersebut harus ditahan oleh pihak yang berwajib.³⁴

Untuk mengembangkan golongan pengusaha pribumi yang kuat khususnya para pedagang menengah *Middestandsveneriging* Surabaya membuat sekolah pedagang menengah.³⁵ Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan skill para pengusaha pribumi guna untuk memperkuat kedudukan pribumi dalam bidang perdagangan dimana di kota Surabaya para pedagang didominasi oleh asing khususnya Tionghoa.

b) Dampak Terhadap Pengusaha Non Pribumi Surabaya

Pengusaha non-pribumi di Surabaya kebanyakan adalah orang Tionghoa yang sejak lama bergerak dalam perdagangan, memiliki banyak jaringan dagang dan memiliki etos kerja yang tinggi, berbeda dengan para pengusaha pribumi yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan melalui kebijakan ekonomi Benteng. Hal ini dalam pelaksanaannya menimbulkan suatu bentuk “kerjasama” antara keduanya. Kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi ini disebut “Ali-Baba”. Ali untuk menyebut pribumi sedangkan Baba untuk menyebut orang Tionghoa (non-pribumi).³⁶

Para pengusaha Tionghoa memberikan respon yang berbeda-beda terhadap sistem Ali-Baba ini. Bagi kalangan pengusaha besar yang memiliki modal yang kuat mereka merespon dengan cara kompromi.³⁷ Namun ada juga kalangan yang menolak yaitu dari kalangan pengusaha kecil yang menganggap sebagai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Seperti yang dinyatakan oleh seorang

pengusaha kecil Tionghoa bernama Njoo Ting Sioe dalam majalah *Star Weekly*:

“...Kapan screening terhadap importir-importir dijalankan dengan sungguh-sungguh? Importir-importir aktentas segera harus diberantas, akan tetapi kenjatannya sekarang mereka masih bertambah seperti jamur, sampai di hotel-hotel kita liht beberapa puluh papan nama firma import-eksport, sedang pada big-bossnya djika ditjari selalu dijawab “masih keluar”... kita tidak pertjaja, bahwa pemerintahtidak tahu kegandjilan ini, rakjat jelata jang oleh karenanja harus membajar barang-barang dengan harga lebih mahal...”³⁸

Selain menunjukkan respon penolakan melalui media cetak, mereka juga menunjukkan sikap perlawanan seperti yang dilakukan oleh seorang Tionghoa di Surabaya yang membagi-bagikan kartu keplek kepada orang-orang yang antre di toko milih H. Abd. Karim seorang pengusaha pribumi. Dengan kartu keplek tersebut orang dapat membeli kain putih. Padahal penjualan kain putih telah habis jauh-jauh hari sebelumnya.³⁹ Respon penolakan juga ditunjukkan oleh pengusaha non-pribumi yang masuk pada kaum pedagang menengah. peraturan mengenai pemberian devisa tahun 1951 tidak mendapat perhatian Kaum Pedagang Menengah.⁴⁰

Para pengusaha non-pribumi dianggap sebagai golongan yang melanggar Peraturan Pemerintah dengan menyuap, menyelundupkan dan menaikkan harga dengan semaunya sendiri. Kebijakan ekonomi Benteng menjadi sarang praktek korupsi, karena untuk para pengusaha non-pribumi memberikan uang kepada pengusaha pribumi untuk mengurus perijinan. Para pengusaha pribumi pun menyogok kepada petugas agar mendapatkan ijin dengan mudah, yang mana pemerintah kota Besar Surabaya menerapkan peraturan bagi para pengusaha yang akan mendirikan usaha harus memperoleh ijin terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Pengganggu (*Hinderordonnantie*)⁴¹.

Pemerintah juga tidak segan-segan untuk mencabut hak lisensi milih pengusaha Tionghoa. Seperti yan terjadi pada Giaw Kong Tjhing yang dicabut hak lisensinya atas usaha percetakan di Jalan Gembong Tebasan.⁴² Sementara pengusaha pribumi bisa dengan mudah mendapatkan ijin. Tetapi untuk pengusaha Tionghoa sangat sulit untuk mengurus surat ijin usaha. Pemerintah menerapkan

³³ Thee Kian Wie. 2003. *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm carii

³⁴ *Suara Rakjat*, 24 Maret 1953

³⁵ *Pewarta Soerabaia*, 19 Mei 1951

³⁶ Eko Satriya Hermawan. 2013. *Menuju Pemilu Pertama: Pelaku Politik Rtnis Tionghoa di Surabaya 1950-an*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hlm 116

³⁷ *Ibid*, hlm 117

³⁸ *Star Weekly*, nomor 456, 25 Desember 1954

³⁹ *Suara Rakjat*, 25 Januari 1955

⁴⁰ *Pewarta Soerabaia*, 14 April 1951

⁴¹ Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. No 129/ D.P.R.D.S. Arsip Kota Surabaya tahun 1953

⁴² Pencabutan hak lisensi. Arsip Kota Surabaya tahun 1953.

peraturan apabila ada yang mengajukan ijin usaha harus disebutkan kewarganegaraanya dengan disertai bukti-bukti yang sah.

Akibat adanya kebijakan ini membuat para pengusaha Tionghoa terbatas untuk melakukan usahanya dan hubungan antara pengusaha pribumi dan pengusaha Tionghoa semakin berjarak. Akibatnya banyak pengusaha Tionghoa yang mencari pekerjaan pada bidang lainnya dan banyak juga yang gulung tikar karena tidak bisa melanjutkan usaha mereka. Diantaranya perusahaan besar yang gulung tikar di kota Surabaya yaitu pabrik rokok A.C, pabrik cat, sandal karet dan Forward Glas Work. Ada juga beberapa perusahaan yang melakukan berbagai kebijakan agar bisa bertahan seperti yang dilakukan oleh pabrik Philips dengan mengurangi produksinya, pabrik mentega hanya beroperasi 10 dalam satu bulannya.

Akibat memburuknya kondisi perekonomian di kota Surabaya, banyak perusahaan yang terpaksa memberhentikan karyawannya. Seperti yang dilakukan oleh Liem Seeng Tee seorang direktur N.V Sampoerna Bioskop. Akibat tindakannya tersebut Serikat Buruh Film Indonesia cabang Surabaya melakukan tuntutan kepada Liem. Liem terpaksa ditahan selama 24 hari oleh Panglima Territorium V Brawidjaya. Tindakan pemecatan juga dilakukan oleh Liok Tjwan Bing pemilik pabrik sandal karet di Gembong Terarte. Liok terpaksa menutup pabriknya akibatnya 104 karyawannya kehilangan pekerjaan. Liok juga terpaksa ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Darurat no. 16.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan masih banyak yang dikuasai dan dikendalikan pihak asing. Untuk itu pemerintah ingin mewujudkan perekonomian dibawah kendali bangsa Indonesia sendiri, yang disebut dengan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan ekonomi nasional tersebut salah satunya pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi Benteng. Melalui kebijakan ini pemerintah ingin meningkatkan peran serta masyarakat pribumi dengan membentuk pengusaha pribumi yang kuat agar perekonomian Indonesia tidak didominasi oleh asing.

Pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Banyak

pengusaha pribumi yang melakukan penyelewengan dengan menjadi pengusaha aktentas. Adanya ulah pengusaha aktentas ini melahirkan sistem Ali-Baba di kalangan pengusaha di Surabaya. Ali sebagai pribumi yang mengurus perijinan sedangkan Baba sebutan bagi pengusaha Tionghoa yang memiliki modal dan perusahaan. Akibat adanya sistem Ali-Baba ini meresahkan para pengusaha lainnya di Surabaya. Tidak semua pengusaha Tionghoa menjadi Baba. Mereka justru menunjukkan penolakan salah satunya melalui media media.

Akibat kebijakan ekonomi Benteng ini banyak pengusaha Tionghoa Surabaya yang kesulitan untuk menjalankan usahanya dan terpaksa gulung tikar karena tidak mendapatkan lisensi untuk mengimpor barang dagangannya. Kebijakan ini justru menimbulkan diskriminasi khususnya pada pengusaha Tionghoa

Namun, pelaksanaan kebijakan ekonomi Benteng di Surabaya tidak sepenuhnya mengalami kegagalan. Kebijakan ini berhasil membentuk pengusaha pribumi yang kuat walaupun jumlahnya tidak banyak. Para pengusaha tersebut mampu memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah dengan baik, yang akhirnya dapat berkembang dan bertahan. Selain itu juga dengan adanya kebijakan 50% impor di Surabaya dipegang oleh pengusaha nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya. No.129/ D.P.R.D.S. Arsip Kota Surabaya tahun 1953
- Pencabutan hak lisensi. Arsip Kota Surabaya tahun 1953.
- Pendaftaran Perusahaan Lingkungan Darmo. Arsip Kota Surabaya Tahun 1952
- Permohonan Ijin Untuk mendirikan Perusahaan Ekspor/Impor dipersil Djl. Genteng Besar No.110. Arsip Kota Surabaya Tahun 1952
- Siaran Djawatan Perindustrian tentang soal warga negara keturunan Asing dalam
- Surat Turunan dari Kementerian Perekonomian Djawatan Perindustrian tanggal 23 Juli 1953 Nomor 2111/BP 602.0-B. Arsip Kota Surabaya tahun 1955

B. Surat Kabar/Majalah sejaman

- Malang Post*, 19 Desember 1953
- Pewart Soerabaia*, 10 Maret 1951
- Pewart Soerabaia*, 14 April 1951
- Pewart Soerabaia*, 17 Mei 1951
- Pewart Soerabaia*, 19 Mei 1951

⁴³ Suara Rakjat, 5 September 1952

Pewarta Soerabaia, 2 Juni 1951
 Pewarta Soerabaia, 16 Agustus 1952
 Pewarta Soerabaia, 21 februari 1953
 Pewarta Soerabaia, 4 April 1953
 Pewarta Soerabaia, 21 Juli 1953
 Pewarta Soerabaia, 5 Agustus 1953
 Suara Rakjat, 5 September 1952
 Suara Rakjat, 24 Maret 1953
 Suara Rakjat, 23 Maret 1955
 Suara Rakjat, 25 Januari 1955
 Star Weekly, 25 Desember 1954

C. Buku, Karya Ilmiah

Aminuddin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Andjarwati Noorjanah. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Dwi Septina Juwita. 2013. *Kegagalan Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Tahun 1950-1953*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Negeri Surabaya

Eko Satriya Hermawan. 2013. *Menuju Pemilu Pertama: Pelaku Politik Rtnis Tionghoa di Surabaya 1950-an*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

H.W. Dick. 2002. *Surabaya, City Of Work. A Socioeconomic History, 1900-2000*. America: Ohio University

_____, Sita van Bemmelen dan Remco Raben (ed). 2011. *Ekonomi Indonesia pada Tahun 1950an: Kurs Beraneka, Jaringan Bisnis serta Hubungan Pusat-Daerah dalam Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-An Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV

Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia

Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998*. PT Balai Pustaka

Nasution. 2006. *Ekonomi Surabaya pada masa kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Intelektual

Parera, J.D (Ed). 2005. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959; Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Purnawan Basundoro. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman, Surabaya Dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak

_____. 2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa kolonial sampai Reformasi (1902-2012)*. Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.

Ricklefs, M.C dan Moh. Sidik Lughraha. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur. Menteri Penerangan.

Sadli, R Kovari, Sumitro Djojohadikusumo. 1953. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Pembangunan

Saroso Wirodihardjo. 1956. *Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Djakarta Press N.V.

_____. 1959. *Masalah Usahawan Nasional*.

Sumitro Djojohadikusumo. 2007. *Jejak Perlawanan Begawan Pajuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____. 2000. *Menghadapi Keadaan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

_____. 1953. *Persolan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

T, Gunandi. 1985. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa.

Thee Kian Wie. 2003. *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Zulkarnain Djamin. 1993. *Perekonomian Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

D. Sumber Internet

Denik Nurcahyanti. 2014. "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Surabaya Tahun 1950-1966". AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2 (3). (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8577>) diunduh 14 Desember 2015

Dian Komala. 2012. Pengaruh Kebijakan Ekonomi Program Benteng Terhadap Pembentukan Pengusaha Pribumi Tahun 1950-1957. Skripsi S-1. FPEB. Universitas Pendidikan Indonesia. (http://a-research.upi.edu/skripsiview.php?export=html&no_skripsi=10935.) diunduh 22 Desember 2015)

Yulita Wisuda Ningrum. 2012. PA : Sistem Administrasi PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya.
Undergraduate thesis, STIKOM Surabaya.
(<http://sir.stikom.edu/1028/>) Diakses 13
Agustus 2016

<https://phesolo.wordpress.com/2013/11/21/sisi-kota-surabaya-tahun-1950-melalui-jepretan-lensa-lex-de-herder/#more-1015> diakses 17 Mei 2016

